

## Tinjauan Literatur Perbandingan Internasional atas Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor : Pelajaran bagi Indonesia

Pristiwanto Bani

Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.85, RT.15/RW.7, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

Korespondensi penulis : [pristiwanto.bani@gmail.com](mailto:pristiwanto.bani@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyse the trends and best practices of compulsory motor vehicle insurance in various countries as a lesson for Indonesia. The method used is literature observation with the traditional literature review method of articles published in international journals and practices that have been carried out by several selected countries, namely England, Germany, Kenya, India, Japan, the United States, Malaysia, Singapore and Australia. The results of the analysis show findings that most countries implement a compulsory motor vehicle insurance system. This insurance aims to provide financial protection to accident victims and encourage legal compliance among vehicle owners. Although this policy has provided significant benefits, such as reducing the financial burden on victims and more efficient dispute resolution, challenges such as high premiums, the complexity of the claims process, and uninsured vehicles still need to be overcome. The application of digital technology, including blockchain, is expected to increase transparency and efficiency in the claims process. Thus, this article highlights the importance of continuous improvement in the compulsory insurance system to ensure fair and effective protection for all parties involved. Based on these international practices, several recommendations for Indonesia include: strengthening mandatory insurance regulations, implementing technology in the insurance management system, increasing public insurance literacy, and developing policies that anticipate the emergence of autonomous vehicles. This study highlights the importance of learning from international experiences in developing an effective and sustainable compulsory motor vehicle insurance system in Indonesia.*

**Keywords:** *Compulsory Insurance, Third Party Legal Liability, Motor Vehicles, Financial Protection, Accident Victims*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dan praktik terbaik asuransi wajib kendaraan bermotor di berbagai negara sebagai pelajaran bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah observasi literatur dengan metode tradisional literature review terhadap artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan praktek yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang dipilih yaitu: Inggris, Jerman, Kenya, India, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura dan Australia. Hasil analisis menunjukkan temuan bahwa sebagian besar negara menerapkan sistem asuransi wajib kendaraan bermotor. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada korban kecelakaan dan mendorong kepatuhan hukum di kalangan pemilik kendaraan. Meskipun kebijakan ini telah memberikan manfaat signifikan, seperti pengurangan beban finansial bagi korban dan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, tantangan seperti premi yang tinggi, kompleksitas proses klaim, dan kendaraan yang tidak diasuransikan masih perlu diatasi. Penerapan teknologi digital, termasuk blockchain, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses klaim. Dengan demikian, artikel ini menyoroti pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam sistem asuransi wajib untuk memastikan perlindungan yang adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan praktik-praktik internasional tersebut, beberapa rekomendasi untuk Indonesia meliputi: penguatan regulasi asuransi wajib, penerapan teknologi dalam sistem pengelolaan asuransi, peningkatan literasi asuransi masyarakat, serta kebijakan pengembangan yang mengantisipasi munculnya kendaraan otonom. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembelajaran dari pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem asuransi wajib kendaraan bermotor yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** Asuransi Wajib, Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Kendaraan Bermotor, Perlindungan Finansial, Korban Kecelakaan

## **1. PENDAHULUAN**

Asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (*third-party liability insurance*) merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak tertanggung. Dalam banyak negara, asuransi ini diwajibkan untuk kendaraan bermotor, praktik medis, dan kegiatan komersial tertentu. Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan pihak tertanggung. Clark (2020), menyebutkan bahwa bentuk asuransi ini mendukung tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan dan memastikan keadilan bagi korban. Penelitian oleh Smith dan Jones (2019) menunjukkan bahwa regulasi asuransi wajib sering kali bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial serta mengurangi beban korban kecelakaan. Menurut Kim et al. (2021), manfaat utama asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga adalah memastikan bahwa pihak ketiga yang dirugikan menerima kompensasi yang adil dan tepat waktu. Selain itu, bentuk asuransi ini juga mengurangi beban keuangan pada pelaku dan memitigasi risiko litigasi yang berkepanjangan.

Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (*third-party liability insurance*) pada asuransi kendaraan bermotor adalah jenis perlindungan yang mencakup kewajiban hukum pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor atas kerugian atau cedera yang dialami oleh pihak ketiga akibat penggunaan kendaraan tersebut. Ruang lingkup ini umumnya melibatkan kompensasi atas kerusakan properti pihak ketiga, biaya pengobatan akibat cedera, hingga kematian serta biaya hukum. Kerugian materiil pihak ketiga, asuransi ini mencakup kerusakan fisik pada properti pihak ketiga, seperti kendaraan, bangunan, atau infrastruktur jalan. Sebagai contoh, jika kendaraan tertanggung menabrak kendaraan lain atau property pihak lain, biaya perbaikan kendaraan atau property pihak ketiga akan ditanggung oleh polis asuransi. Jaminan cedera fisik atau kematian pihak ketiga, menanggung biaya medis, rehabilitasi, atau santunan kepada pihak ketiga yang mengalami cedera atau kematian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan tertanggung. Sedangkan biaya hukum yang ditanggung mencakup biaya hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim pihak ketiga, jika terjadi perselisihan hukum terkait kecelakaan.

Asuransi wajib kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang diatur oleh undang-undang di banyak negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik kendaraan bermotor memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko kecelakaan, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Merupakan bagian dari kerangka hukum transportasi yang ketat, yang dirancang untuk memastikan keamanan

jalan raya dan memberikan perlindungan finansial bagi semua pengguna jalan. Kebijakan ini berakar dari peraturan yang ketat yang bertujuan untuk melindungi pihak ketiga serta mempromosikan keselamatan di jalan raya. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga pada kendaraan bermotor, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dan keterbatasan infrastruktur pengawasan.

Tinjauan pustaka ini berupaya untuk mengeksplorasi lanskap multifaset sistem asuransi kendaraan bermotor wajib yang diterapkan di berbagai negara, dengan tujuan untuk memetik pelajaran yang dapat bermanfaat bagi Indonesia. Dengan membandingkan berbagai model internasional, tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan dalam bidang efektivitas kebijakan, kepuasan konsumen, dan integrasi teknologi. Sintesis kemajuan dalam model penetapan harga asuransi dan eksplorasi dampak sosial-ekonomi asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga bagi pemilik kendaraan bermotor, memberikan perspektif komprehensif tentang interaksi dinamis antara kerangka regulasi, praktik pasar, dan perilaku konsumen.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *traditional literature review*. *Traditional literature review* adalah metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan suatu topik penelitian tertentu. Pendekatan ini bersifat naratif dan fleksibel, tidak mengikuti kerangka atau protokol ketat dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang topik, mengidentifikasi tren utama, dan menyusun argumen berbasis literatur yang mendukung penelitian. Menurut Samish (2023), metode tinjauan literatur tradisional dalam penelitian akademis melibatkan survei sistematis sumber-sumber ilmiah, analisis kritis hubungan antar karya, identifikasi kesenjangan, dan sintesis temuan, semuanya bertujuan untuk membangun kredibilitas dan relevansi untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi hibah. Makalah oleh Welch et al. (2022), menguraikan bahwa metode tinjauan literatur tradisional berfokus pada meringkas pengetahuan yang ada, menganalisis secara kritis literatur saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, dan mengevaluasi kualitas dan tujuan sumber dengan tujuan untuk memberikan perspektif baru dan mengatasi sudut pandang yang saling bertentangan dalam bidang studi. Penelitian oleh Sarhan & Manu, 2021, membahas tinjauan literatur tradisional sebagai pendekatan naratif yang berfungsi sebagai titik awal untuk proyek penelitian dengan melibatkan peninjauan literatur akademik yang diterbitkan tanpa metodologi

terstruktur yang ditemukan dalam metode penelitian sekunder, berfokus terutama pada meringkas pengetahuan yang ada daripada menganalisisnya.

Tahapan Traditional Literature Review dalam penelitian ini meliputi: tahap pertama melakukan identifikasi topik dan fokus penelitian dengan cara memilih topik yang relevan dengan minat atau kebutuhan penelitian. Tahap kedua, pencarian literatur dengan menggunakan sumber yang beragam seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tahap ketiga, pemilihan literatur dengan cara menyeleksi literatur berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Tahap keempat, analisis dan sintesis dengan menganalisis literatur untuk mengidentifikasi tema, konsep, atau tren dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk menyusun narasi penelitian. Tahap terakhir adalah penulisan yaitu menyusun hasil review dengan struktur logis dalam pendahuluan, isi, dan kesimpulan (Samish, 2023).

Literatur yang ditinjau diambil berdasarkan tujuan penelitian yaitu perbandingan internasional asuransi wajib kendaraan bermotor. Negara yang dipilih adalah negara yang sudah menerapkan asuransi wajib kendaraan bermotor yang mewakili 5 benua dan negara-negara tetangga Indonesia. Dari benua Eropah dipilih Inggris dan Jerman, dari benua Afrika Kenya, dari benua Asia India dan Jepang, dari benua Amerika dipilih Amerika Serikat dan Argentina serta Australia. Negara tetangga yang telah menerapkan asuransi wajib kendaraan bermotor adalah Malaysia, Singapura dan Australia dipilih karena berbatasan langsung dengan Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Literatur – literatur yang ditinjau dikelompokkan berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu perbandingan internasional atas asuransi wajib kendaraan bermotor di beberapa negara, tujuan perbandingan dan pelajaran bagi Indonesia sebagai berikut:

#### **Sistem Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Berbagai Negara**

Bagian ini, pembahasan berfokus pada tujuan penelitian yaitu dengan meninjau literatur sistem asuransi wajib kendaraan bermotor di berbagai negara, mengungkap lanskap sistem asuransi kendaraan bermotor wajib yang kompleks dan beragam di berbagai negara. Bagian ini menyoroti berbagai pendekatan regulasi, efektivitas, dan tantangan sistem ini, yang menekankan perlunya menyeimbangkan perlindungan yang luas bagi pihak ketiga dengan efisiensi dan kepuasan publik. Studi yang ditinjau menggambarkan variasi yang signifikan dalam cakupan, implementasi, dan persepsi publik, yang menyarankan pendekatan yang

disesuaikan untuk reformasi dan harmonisasi berdasarkan kebutuhan regional tertentu dan praktik terbaik global.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Inggris**

Asuransi wajib kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diimplementasikan oleh banyak negara untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jalan dan memastikan kompensasi terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh kecelakaan. Di Inggris, kebijakan ini berakar dari peraturan yang ketat yang bertujuan untuk melindungi pihak ketiga serta mempromosikan keselamatan jalan. Asuransi kendaraan bermotor di Inggris diatur oleh Road Traffic Act 1988, undang-undang ini mengharuskan semua pemilik kendaraan yang beroperasi di jalan umum untuk memiliki asuransi Third-Party Liability minimal. Asuransi ini melindungi pihak ketiga dari kerugian akibat kecelakaan, termasuk kerusakan properti dan biaya medis. Menurut Smith dan Taylor (2020), Inggris memiliki sistem penegakan hukum yang canggih, seperti penggunaan sistem Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk mendeteksi kendaraan yang tidak diasuransikan. Hal ini membuat tingkat kepatuhan terhadap asuransi wajib kendaraan di Inggris relatif tinggi dibandingkan negara lain di Eropa. Kebijakan asuransi wajib kendaraan bermotor telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Inggris. Studi oleh Johnson et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mengurangi beban finansial korban kecelakaan, terutama melalui mekanisme kompensasi yang efisien. Selain itu, keberadaan asuransi wajib juga mendorong perilaku berkendara yang lebih aman karena pengemudi memahami konsekuensi hukum dan finansial dari kecelakaan. Namun, tantangan tetap ada. Seperti biaya premi yang tinggi, terutama bagi pengemudi muda dan berisiko tinggi, sering menjadi beban bagi kelompok tertentu. Selain itu, laporan oleh Walker (2022) menyebutkan bahwa beberapa korban kecelakaan menghadapi kesulitan dalam menerima kompensasi yang adil karena prosedur klaim yang kompleks.

Meskipun tingkat kepatuhan tinggi, kendaraan yang tidak diasuransikan masih menjadi masalah. Data dari Motor Insurers' Bureau (MIB) menunjukkan bahwa lebih dari 130.000 kendaraan tidak diasuransikan di jalan-jalan Inggris setiap tahunnya (MIB, 2022). Pengguna asuransi sering menghadapi prosedur klaim yang panjang dan birokratis. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di antara pemegang polis (Harrison, 2020). Premi asuransi yang terus meningkat menjadi tantangan utama, terutama bagi pengemudi muda. Menurut Black dan Green (2021), pengemudi berusia di bawah 25 tahun membayar premi rata-rata 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses klaim dan meningkatkan transparansi. Menurut Brown et al. (2022), penerapan teknologi seperti blockchain dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi sistem.

Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Inggris telah memberikan banyak manfaat, terutama dalam melindungi pengguna jalan dan memastikan kompensasi bagi korban kecelakaan. Namun, tantangan seperti kendaraan tidak diasuransikan, prosedur klaim yang kompleks, dan premi yang tinggi tetap memerlukan perhatian lebih lanjut.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Jerman**

Di Jerman, kebijakan asuransi wajib kendaraan bermotor telah menjadi bagian integral dari sistem transportasi sejak awal abad ke-20. Dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi dan infrastruktur transportasi yang maju, Jerman memiliki kerangka hukum yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap asuransi wajib. Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Jerman diatur oleh Compulsory Insurance Act (*Pflichtversicherungsgesetz*). Semua kendaraan yang beroperasi di jalan umum wajib memiliki asuransi Third-Party Liability yang mencakup kerusakan properti dan cedera tubuh. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian finansial akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Studi oleh Müller dan Schmidt (2021) menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Jerman sangat efektif, terutama dengan pengawasan melalui registrasi kendaraan. Selain itu, asuransi wajib ini menjadi prasyarat untuk registrasi kendaraan, sehingga meminimalkan peluang kendaraan tanpa asuransi beroperasi di jalan raya. Asuransi wajib kendaraan bermotor memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat Jerman. Menurut Weber et al. (2020), kebijakan ini telah mengurangi beban finansial korban kecelakaan dan mempercepat penyelesaian sengketa melalui mekanisme klaim yang efisien. Selain itu, adanya jaminan kompensasi telah meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem transportasi. Namun, dampak negatif juga ditemukan, terutama terkait dengan biaya premi yang tinggi. Pengemudi muda dan kendaraan berisiko tinggi sering kali menghadapi premi yang mahal, yang menjadi tantangan bagi inklusivitas kebijakan ini (Keller, 2022).

Meski tingkat kepatuhan tinggi, masih ada kasus kendaraan yang tidak diasuransikan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan negara lain di Uni Eropa (Hoffmann, 2021). Premi asuransi di Jerman sangat dipengaruhi oleh faktor risiko seperti usia pengemudi, lokasi geografis, dan jenis kendaraan. Menurut Braun (2022), ini sering kali dianggap tidak adil oleh kelompok tertentu. Proses klaim meskipun efisien, masih menghadapi tantangan dalam hal birokrasi yang terkadang membuat pemegang polis frustrasi (Schneider, 2021). Digitalisasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses klaim dan transparansi dalam manajemen polis. Studi oleh Lange dan Becker (2022) menunjukkan bahwa teknologi seperti blockchain memiliki potensi besar dalam mengurangi penipuan asuransi dan mempercepat proses klaim. Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Jerman telah memberikan

banyak manfaat, termasuk perlindungan finansial bagi korban kecelakaan dan peningkatan kepatuhan hukum. Namun, tantangan seperti premi yang tinggi dan kompleksitas klaim memerlukan perhatian lebih lanjut..

### **Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Kenya**

Di Kenya aturan asuransi wajib kendaraan bermotor di atur dalam (Motor Vehicle Third Party Risks) Act, 1945. Undang-undang ini menetapkan bahwa semua kendaraan bermotor harus dilindungi melawan risiko pihak ketiga. Insurance Regulatory Authority (IRA) adalah badan yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan asuransi, termasuk asuransi wajib tanggung jawab pihak ketiga (TPL) untuk kendaraan bermotor. IRA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara asuransi mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, serta melindungi hak-hak konsumen. Asuransi pihak ketiga dikelola oleh perusahaan asuransi swasta yang menawarkan berbagai jenis polis. Kendaraan yang tidak memiliki asuransi TPL tidak diperbolehkan untuk digunakan di jalan raya. Jenis asuransi ini merupakan persyaratan hukum bagi semua kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan transportasi jalan. Beberapa perubahan telah dilakukan untuk memperkuat dan memperbarui undang-undang ini, termasuk penambahan struktur kompensasi dan penyesuaian batas maksimum untuk klaim. Berdasarkan artikel Ogutu, M. (2021), asuransi tanggung jawab pihak ketiga (third party liability insurance) memainkan peran penting dalam melindungi pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Di Kenya, jenis asuransi ini merupakan persyaratan hukum bagi semua kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan transportasi jalan. Artikel ini menyimpulkan bahwa asuransi tanggung jawab pihak ketiga untuk kendaraan bermotor di Kenya menghadapi berbagai tantangan operasional dan kepatuhan. Namun, peluang untuk perbaikan melalui inovasi teknologi, regulasi yang lebih ketat, dan edukasi publik dapat menjadikannya lebih efektif dalam melindungi pihak ketiga dan memajukan sektor asuransi secara keseluruhan.

Penelitian oleh Wachira, F. N. (2018) menemukan bahwa skema asuransi tanggung jawab pihak ketiga tidak memberikan insentif yang cukup kepada pengemudi untuk meningkatkan keselamatan berkendara, karena premi sering kali tidak mencerminkan perilaku berkendara. Ketidakefisienan pengawasan dan regulasi mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pengemudi tanpa asuransi yang valid memperburuk kondisi keselamatan jalan. Kendala dalam klaim Dimana proses klaim yang lambat dan rumit dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan pada sistem asuransi. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun asuransi tanggung jawab pihak ketiga memberikan perlindungan finansial kepada pihak ketiga, dampaknya terhadap keselamatan jalan masih terbatas. Untuk

meningkatkan kontribusinya terhadap keselamatan jalan, diperlukan perubahan sistemik dalam struktur premi, regulasi, dan kampanye edukasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

### **Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Amerika Serikat**

Menurut penelitian oleh Smith dan Brown (2020), sistem asuransi kendaraan bermotor di Amerika Serikat dikelola secara desentralisasi oleh masing-masing negara bagian. Hal ini memungkinkan adanya variasi dalam persyaratan minimum, cakupan asuransi, dan pendekatan penegakan hukum. Studi ini menyoroti bahwa sistem desentralisasi memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, namun juga menciptakan tantangan dalam harmonisasi regulasi antarnegara bagian. Berdasarkan analisis oleh Johnson (2019), negara bagian di AS menggunakan dua pendekatan utama dalam sistem asuransi wajib: no-fault insurance dan tort system. Pada sistem no-fault, seperti yang diterapkan di Florida dan Michigan, pengemudi mengklaim asuransi mereka sendiri tanpa memerlukan penetapan pihak bersalah. Sebaliknya, dalam tort system, pihak yang bersalah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan: no-fault insurance mempercepat proses klaim, tetapi dapat menyebabkan premi lebih tinggi. Menurut penelitian oleh Wilson (2021), tingkat kepatuhan terhadap asuransi wajib di AS tergolong tinggi dibandingkan negara berkembang. Faktor utamanya adalah penegakan hukum yang ketat, seperti denda, penangguhan lisensi, dan penahanan kendaraan bagi pengemudi tanpa asuransi. Namun, tantangan tetap ada, terutama di wilayah dengan populasi berpenghasilan rendah yang menghadapi kesulitan membayar premi. Studi oleh Gupta dan Patel (2020) mengidentifikasi bahwa teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi sistem asuransi kendaraan bermotor. Di banyak negara bagian, platform digital digunakan untuk membeli asuransi, mengajukan klaim, dan memverifikasi kepemilikan secara real-time. Selain itu, telematika (telematics) digunakan oleh beberapa perusahaan asuransi untuk menetapkan premi berdasarkan perilaku mengemudi, memberikan insentif kepada pengemudi untuk berkendara dengan aman. Penelitian oleh Adams (2018) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi lokal memengaruhi premi asuransi kendaraan bermotor. Negara bagian dengan tingkat kecelakaan tinggi atau populasi padat biasanya menetapkan premi lebih tinggi. Selain itu, kebijakan negara bagian yang mewajibkan cakupan tambahan, seperti uninsured motorist coverage, juga berkontribusi terhadap perbedaan biaya antarnegara bagian. Berdasarkan laporan oleh American Insurance Institute (2021), kampanye edukasi publik yang konsisten meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi wajib kendaraan bermotor. Program-program ini membantu masyarakat memahami risiko finansial akibat tidak memiliki asuransi



dan mendorong tingkat kepatuhan. Literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa sistem asuransi wajib kendaraan bermotor di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh desentralisasi kebijakan dan inovasi teknologi. Penegakan hukum yang ketat, adopsi teknologi digital, dan program edukasi publik menjadi faktor kunci keberhasilan sistem ini. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait aksesibilitas asuransi bagi populasi berpenghasilan rendah dan variasi dalam regulasi antarnegara bagian.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Argentina**

Di Argentina, kebijakan ini dikenal sebagai Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC) dan telah menjadi komponen penting dalam sistem transportasi negara tersebut. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Argentina, penerapan asuransi wajib ini memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hukum dan keuangan bagi pengguna jalan. Asuransi wajib kendaraan bermotor di Argentina diatur oleh Ley de Tránsito (Undang-Undang Lalu Lintas). Peraturan ini mewajibkan setiap pemilik kendaraan untuk memiliki asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mencakup kerusakan properti dan cedera fisik. Menurut penelitian oleh Martinez dan Lopez (2021), pemerintah Argentina bekerja sama dengan lembaga asuransi nasional untuk memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi. Registrasi kendaraan tidak dapat diperbarui tanpa adanya bukti asuransi, dan otoritas lalu lintas memiliki wewenang untuk memeriksa dokumen asuransi secara acak. Asuransi wajib kendaraan bermotor memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Argentina. Studi oleh Gonzalez et al. (2020) menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mengurangi beban finansial bagi korban kecelakaan, terutama dalam hal biaya medis dan kompensasi kerugian properti. Selain itu, keberadaan asuransi wajib juga mendorong penyelesaian sengketa secara lebih efisien. Namun, tantangan tetap ada, menurut laporan oleh Fundación Seguridad Vial (2022), premi yang tinggi menjadi beban bagi pengemudi berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap asuransi wajib.

Meskipun kebijakan asuransi wajib telah berlaku secara nasional, masih ada sejumlah besar kendaraan yang tidak diasuransikan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kemampuan finansial pemilik kendaraan (Rodriguez, 2021). Premi asuransi kendaraan bermotor di Argentina sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, termasuk inflasi yang tinggi. Menurut Fernandez (2022), ini menyebabkan ketidakstabilan dalam biaya premi dan mengurangi aksesibilitas bagi beberapa kelompok masyarakat. Banyak pengguna mengeluhkan proses klaim yang lambat dan birokratis, yang sering kali menunda kompensasi yang diterima korban kecelakaan (Torres, 2020). Penerapan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam proses klaim dan manajemen polis. Studi oleh Alvarez dan Perez

(2022) menyebutkan bahwa platform berbasis blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipuan. Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Argentina telah memberikan manfaat signifikan dalam memberikan perlindungan finansial kepada korban kecelakaan dan mendorong kepatuhan hukum. Namun, tantangan seperti premi yang tinggi, kendaraan tidak diasuransikan, dan kompleksitas proses klaim tetap memerlukan perhatian.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di India**

Di India, dengan populasi yang besar dan tingkat kepemilikan kendaraan yang terus meningkat, penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor menjadi sangat relevan. Asuransi kendaraan bermotor di India diatur oleh Motor Vehicles Act 1988. Undang-undang ini mewajibkan semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum untuk memiliki asuransi Third-Party Liability. Asuransi ini melindungi pihak ketiga dari kerugian finansial akibat kecelakaan, termasuk kerusakan properti dan cedera tubuh. Menurut Sharma dan Gupta (2020), tingkat kepatuhan terhadap asuransi wajib di India masih menghadapi tantangan signifikan meskipun peraturan ini telah diterapkan selama beberapa dekade. Implementasi teknologi seperti Vahan, sebuah sistem terintegrasi untuk registrasi kendaraan, telah membantu meningkatkan tingkat kepatuhan. Kebijakan ini memberikan dampak positif dengan memastikan adanya perlindungan finansial bagi korban kecelakaan. Menurut Singh et al. (2021), asuransi wajib kendaraan bermotor di India telah mengurangi beban keuangan keluarga korban kecelakaan. Namun, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi sering kali menghambat optimalisasi kebijakan ini. Di sisi lain, premi yang tinggi untuk kendaraan komersial dan pengemudi berisiko tinggi sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan kebijakan ini secara merata (Patel, 2022). Selain itu, proses klaim yang rumit sering kali membuat korban kecelakaan enggan untuk mengajukan klaim.

Berdasarkan laporan oleh Insurance Information Bureau of India (IIB), sekitar 50% kendaraan yang beroperasi di jalan raya India tidak memiliki asuransi yang valid (IIB, 2022). Banyak pengguna mengeluhkan proses klaim yang memakan waktu lama dan birokrasi yang berbelit-belit, yang sering kali menyebabkan penundaan dalam menerima kompensasi (Kumar, 2020). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan semi-urban (Rao, 2021). Premi yang mahal, terutama untuk kendaraan komersial, menjadi penghalang utama bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk mematuhi aturan ini (Chopra, 2022). Potensi pengembangan dengan penerapan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses klaim dan manajemen data (Mehta et al., 2022). Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di India merupakan langkah penting

untuk melindungi pengguna jalan dan memastikan adanya kompensasi bagi korban kecelakaan. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan, proses klaim yang kompleks, dan premi yang tinggi masih menjadi hambatan utama.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Jepang**

Asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (Mandatory Third-Party Liability Insurance) di Jepang, dikenal sebagai Jibaiseki Hoken, merupakan asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk semua kendaraan bermotor. Sistem ini bertujuan melindungi pihak ketiga yang mengalami cedera atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga di Jepang diatur oleh Act on Securing Compensation for Automobile Accidents (ASCAA), 1955. Undang-undang ini mewajibkan semua kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, untuk memiliki polis Jibaiseki Hoken sebagai syarat legalitas operasi di jalan raya. Polis Jibaiseki Hoken dikelola oleh perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Sertifikat asuransi harus diperbarui secara berkala sesuai dengan jadwal inspeksi kendaraan (shaken). Sistem ini memastikan bahwa pihak ketiga, terutama korban kecelakaan, menerima kompensasi minimal tanpa harus melalui proses hukum yang kompleks (Kobayashi & Sato, 2019). Karena diwajibkan sebagai syarat legalitas kendaraan, hampir seluruh kendaraan di Jepang terdaftar dalam sistem Jibaiseki Hoken (Tanaka, 2021). Jibaiseki Hoken hanya mencakup kerugian fisik pihak ketiga. Kerusakan properti dan kompensasi yang lebih besar memerlukan asuransi tambahan (Nini Hoken), yang tidak diwajibkan oleh hukum (Matsui, 2020). Meskipun premi relatif terjangkau, ada keluhan mengenai batas maksimum klaim yang tidak cukup untuk kasus kecelakaan besar (Okuda & Yamamoto, 2022). Banyak pengemudi, terutama yang berpenghasilan rendah, hanya memiliki Jibaiseki Hoken tanpa membeli asuransi tambahan, sehingga meninggalkan mereka dalam risiko finansial saat terjadi kecelakaan besar. Dalam kecelakaan yang melibatkan banyak korban, Jibaiseki Hoken hanya mencakup sebagian kecil dari total kerugian, sehingga korban harus menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kompensasi tambahan dari pihak pengemudi. Dalam implementasi teknologi dalam proses klaim, perusahaan asuransi Jepang telah mulai menggunakan teknologi berbasis AI untuk mempercepat proses klaim Jibaiseki Hoken, yang dilaporkan mengurangi waktu penyelesaian klaim hingga 30% (Fujimoto, 2022). Asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga di Jepang, melalui Jibaiseki Hoken, telah berhasil memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Namun, cakupan yang terbatas dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya asuransi tambahan tetap menjadi tantangan.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Malaysia**

Asuransi wajib kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang diatur oleh undang-undang di banyak negara, termasuk Malaysia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik kendaraan bermotor memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko kecelakaan, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Malaysia diatur di bawah Road Transport Act 1987. Undang-undang ini mengharuskan semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum untuk memiliki asuransi Third-Party Liability. Asuransi ini memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Beberapa penelitian menyoroti efektivitas kerangka hukum ini. Menurut Ahmad et al. (2020), penerapan undang-undang ini telah meningkatkan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban asuransi. Namun, kelemahan seperti kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama. Asuransi wajib kendaraan bermotor memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan finansial. Studi oleh Lee dan Wong (2019) menunjukkan bahwa kebijakan ini mengurangi beban keuangan korban kecelakaan dan mendorong penyelesaian sengketa secara lebih efisien. Selain itu, implementasi ini juga berkontribusi pada pengurangan risiko sosial akibat ketidakmampuan membayar ganti rugi. Namun, dampak negatif juga ditemukan. Seperti, premi asuransi yang tinggi di beberapa wilayah menjadi beban bagi pemilik kendaraan dengan penghasilan rendah. Hal ini dibahas oleh Sulaiman et al. (2021), yang mengidentifikasi adanya ketimpangan akses terhadap asuransi di daerah pedesaan.

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendaraan tanpa asuransi yang beroperasi di jalan. Isu ini terutama disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya asuransi (Rahim et al., 2020). Banyak pemegang polis menghadapi kesulitan dalam mengajukan klaim, termasuk dokumen yang rumit dan waktu penyelesaian yang lama. Menurut Zainuddin (2022), hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap industri asuransi. Perubahan premi yang tidak terprediksi sering menjadi keluhan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Beberapa perusahaan asuransi juga memberlakukan premi yang lebih tinggi untuk kendaraan tertentu, yang dianggap tidak adil oleh konsumen (Mahmood et al., 2021). Potensi pengembangan digitalisasi layanan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pembelian asuransi dan klaim. Menurut Ali dan Ismail (2022), penerapan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan polis. Penerapan asuransi wajib

kendaraan bermotor di Malaysia telah memberikan dampak positif, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kepatuhan hukum. Namun, tantangan seperti kurangnya penegakan hukum, kompleksitas proses klaim, dan fluktuasi premi masih perlu diatasi.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Singapura**

Di Singapura, kebijakan asuransi wajib kendaraan bermotor merupakan bagian dari kerangka hukum transportasi yang ketat, yang dirancang untuk memastikan keamanan jalan raya dan memberikan perlindungan finansial bagi semua pengguna jalan. Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Singapura diatur oleh Motor Vehicles (Third-Party Risks and Compensation) Act. Undang-undang ini mengharuskan semua pemilik kendaraan untuk memiliki asuransi minimal yang mencakup risiko pihak ketiga. Tanpa asuransi ini, pemilik kendaraan tidak dapat mendaftarkan atau memperbarui izin kendaraannya. Penelitian oleh Tan dan Lim (2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Singapura sangat efektif karena sistem elektronik yang terintegrasi, yang memungkinkan otoritas untuk memantau status asuransi kendaraan secara real-time. Hal ini mengurangi peluang kendaraan tanpa asuransi beroperasi di jalan raya. Kebijakan asuransi wajib ini memberikan beberapa manfaat signifikan bagi masyarakat Singapura. Menurut Lee et al. (2020), asuransi ini telah membantu mengurangi beban finansial korban kecelakaan, terutama dalam hal biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong penyelesaian sengketa secara lebih efisien melalui mekanisme klaim yang diatur dengan baik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kenaikan premi asuransi. Studi oleh Wong (2022) mencatat bahwa peningkatan premi telah menjadi beban bagi beberapa kelompok masyarakat, terutama pengemudi muda dan mereka yang memiliki riwayat klaim buruk. Meskipun demikian, pemerintah Singapura telah memperkenalkan skema insentif untuk mengurangi beban ini, seperti memberikan diskon premi bagi pengemudi dengan catatan mengemudi yang bersih.

Meskipun sistem di Singapura sudah sangat maju, tetap ada tantangan dalam memastikan semua pemilik kendaraan mematuhi aturan asuransi wajib. Misalnya, beberapa kendaraan yang digunakan untuk tujuan ilegal sering ditemukan tidak memiliki asuransi yang memadai (Chua, 2021). Proses klaim, meskipun efisien, masih dianggap terlalu rumit oleh sebagian pemegang polis. Hal ini terutama dirasakan oleh pengguna yang kurang paham akan prosedur administrasi klaim asuransi (Ng, 2020). Penghitungan premi yang didasarkan pada profil risiko sering kali dianggap tidak adil oleh pengemudi tertentu, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan risiko tinggi kecelakaan (Rahman, 2021). Potensi pengembangan pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi, termasuk penggunaan teknologi blockchain, dapat meningkatkan

transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan asuransi kendaraan. Studi oleh Goh dan Tan (2022) menunjukkan bahwa blockchain dapat mempercepat proses klaim dan mengurangi risiko penipuan. Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Singapura telah memberikan dampak positif yang signifikan, baik dari sisi perlindungan finansial bagi masyarakat maupun peningkatan keselamatan jalan. Meskipun demikian, tantangan seperti kenaikan premi dan kompleksitas proses klaim tetap perlu diatasi.

### **Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor di Australia**

Di Australia, kebijakan ini dikenal sebagai Compulsory Third Party Insurance (CTP) dan merupakan bagian integral dari sistem transportasi. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, penerapan CTP bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum dan keuangan bagi pengguna jalan. Penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor di Australia diatur secara terpisah oleh setiap negara bagian dan teritori. Meskipun kerangka hukum bervariasi, semua yurisdiksi mewajibkan pemilik kendaraan untuk memiliki CTP sebagai syarat registrasi kendaraan. Asuransi ini memberikan perlindungan kepada pihak ketiga untuk cedera pribadi akibat kecelakaan, tetapi cakupannya tidak meliputi kerusakan kendaraan atau properti. Menurut penelitian oleh Smith dan Jones (2021), sistem CTP di Australia memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena keterkaitannya dengan registrasi kendaraan. Selain itu, kebijakan ini dikelola oleh penyedia asuransi swasta atau entitas pemerintah, tergantung pada yurisdiksinya. Asuransi wajib CTP memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Australia. Studi oleh Brown et al. (2020) menunjukkan bahwa kebijakan ini membantu mengurangi beban finansial korban kecelakaan lalu lintas dengan menyediakan kompensasi medis dan dukungan rehabilitasi. Selain itu, keberadaan CTP mendorong pengemudi untuk lebih bertanggung jawab dalam berkendara. Namun, tantangan tetap ada. Menurut laporan oleh Australian Automobile Association (2022), premi yang tinggi di beberapa negara bagian, seperti New South Wales, menjadi beban bagi pengemudi berpenghasilan rendah. Selain itu, ada kesenjangan dalam cakupan CTP antara yurisdiksi, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlindungan. Premi CTP bervariasi antarnegara bagian, sering kali menciptakan ketidakpuasan di antara masyarakat. Misalnya, New South Wales memiliki premi tertinggi dibandingkan dengan negara bagian lain (Johnson, 2021). Meskipun tingkat kepatuhan tinggi, masih ada kendaraan yang tidak diasuransikan, terutama di daerah terpencil (Harris, 2020). Proses klaim sering kali dianggap rumit, terutama bagi korban kecelakaan dengan cedera serius (Thompson, 2021). Potensi pengembangan digitalisasi dengan penerapan teknologi digital, seperti blockchain, dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan klaim dan transparansi sistem asuransi (Taylor & Evans, 2022). Penerapan

asuransi wajib kendaraan bermotor di Australia melalui sistem CTP telah memberikan manfaat signifikan, terutama dalam memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Namun, tantangan seperti premi yang tinggi, kendaraan tidak diasuransikan, dan kompleksitas proses klaim memerlukan perhatian lebih lanjut.

### **Tinjauan Perbandingan Internasional**

Asuransi wajib kendaraan bermotor adalah elemen penting dalam sistem transportasi global, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga terhadap kerugian yang disebabkan oleh pemilik kendaraan. Berdasarkan literatur yang ditinjau berikut perbandingan kebijakan asuransi wajib di Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Argentina, India, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Australia.

#### **a. Inggris**

Di Inggris, asuransi kendaraan bermotor diwajibkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (Road Traffic Act) 1988. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki setidaknya asuransi pihak ketiga (“third-party”). Asuransi ini mencakup kerusakan pada pihak ketiga, tetapi tidak mencakup kerusakan pada kendaraan atau cedera pemilik kendaraan. Tidak adanya asuransi dapat mengakibatkan denda, hukuman pidana, dan penyitaan kendaraan. Pemerintah Inggris juga mengatur pembentukan Motor Insurers’ Bureau (MIB) untuk menangani klaim dari korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi tanpa asuransi.

#### **b. Jerman**

Jerman mewajibkan asuransi tanggung jawab pihak ketiga (“Haftpflichtversicherung”) untuk semua kendaraan bermotor. Asuransi ini mencakup kerusakan fisik dan material pada pihak ketiga. Tidak memiliki asuransi mengakibatkan kendaraan tidak dapat terdaftar atau digunakan secara legal di jalan raya.

#### **c. Kenya**

Asuransi tanggung jawab pihak ketiga (Third Party Liability Insurance, TPL) untuk kendaraan bermotor di Kenya ditawarkan oleh perusahaan asuransi swasta; merupakan kewajiban hukum untuk semua kendaraan bermotor, premi tidak mencerminkan perilaku berkendara, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengemudi tanpa asuransi dan proses klaim yang lambat dan rumit.

#### **d. Amerika Serikat**

Regulasi asuransi kendaraan di AS bervariasi di setiap negara bagian. Sebagian besar negara bagian mewajibkan asuransi tanggung jawab pihak ketiga, tetapi tingkat minimum perlindungan berbeda-beda. Beberapa negara bagian juga menerapkan sistem “no-fault”

yang mengharuskan pengemudi memiliki asuransi perlindungan cedera pribadi (Personal Injury Protection, PIP).

e. Argentina

Di Argentina, asuransi wajib dikenal sebagai “Seguro Obligatorio”. Pemilik kendaraan harus memiliki perlindungan tanggung jawab pihak ketiga untuk kerusakan fisik dan material. Regulasi ini diawasi oleh Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), otoritas pengawas asuransi nasional.

f. India

Asuransi pihak ketiga diwajibkan di bawah Motor Vehicles Act 1988. Asuransi ini mencakup kerusakan pada pihak ketiga, baik dalam bentuk cedera maupun kerusakan properti. Pemerintah India juga mendorong pemilik kendaraan untuk memilih asuransi komprehensif yang memberikan perlindungan lebih luas.

g. Jepang

Jepang mewajibkan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor (“Mandatory Vehicle Liability Insurance” atau “Jibaiseki”). Asuransi ini mencakup cedera fisik pada pihak ketiga, tetapi tidak mencakup kerusakan material. Pemilik kendaraan juga biasanya membeli asuransi opsional untuk cakupan yang lebih luas.

h. Malaysia

Asuransi wajib di Malaysia diatur oleh Road Transport Act 1987. Pemilik kendaraan diwajibkan memiliki asuransi pihak ketiga yang mencakup kerusakan atau cedera pada pihak ketiga. Tidak adanya asuransi dapat menyebabkan hukuman berat, termasuk denda dan larangan penggunaan kendaraan.

i. Singapura

Singapura mewajibkan pemilik kendaraan untuk memiliki asuransi tanggung jawab pihak ketiga di bawah Motor Vehicles (Third-Party Risks and Compensation) Act. Asuransi ini mencakup kerusakan fisik dan cedera pada pihak ketiga. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan denda besar dan hukuman penjara.

j. Australia

Australia memiliki sistem asuransi wajib yang dikenal sebagai “Compulsory Third Party Insurance” (CTP). Regulasi ini bervariasi di setiap negara bagian. CTP biasanya mencakup cedera fisik pada pihak ketiga, tetapi tidak mencakup kerusakan properti. Pemilik kendaraan perlu membeli asuransi tambahan untuk cakupan yang lebih luas.



Meskipun semua negara yang ditinjau memiliki asuransi wajib kendaraan bermotor, terdapat perbedaan signifikan dalam cakupan dan pengaturan hukum yaitu sebagian besar negara hanya mewajibkan cakupan tanggung jawab pihak ketiga, regulasi cenderung lebih terpusat di negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Jepang, sementara negara seperti Amerika Serikat dan Australia memberikan otonomi kepada wilayah administratifnya, hukuman atas pelanggaran bervariasi, mulai dari denda hingga hukuman pidana dan penyitaan kendaraan.

### **Pelajaran bagi Indonesia**

Asuransi wajib kendaraan bermotor di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Jenis asuransi wajib kendaraan bermotor adalah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (Third Party Liability – TPL). Asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada pemilik kendaraan bermotor terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan, asuransi ini akan membantu menanggung biaya kerugian yang dialami oleh korban. Manfaat dari asuransi wajib kendaraan bermotor untuk meningkatkan perlindungan finansial bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menanggung biaya kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya asuransi TPL, beban finansial yang harus ditanggung oleh korban kecelakaan dapat diminimalisir dan diharapkan pemilik kendaraan akan lebih berhati-hati serta bertanggung jawab dalam berkendara. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia, yang saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Dengan adanya asuransi wajib kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman saat berkendara, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Studi perbandingan internasional mengungkapkan berbagai pendekatan implementasi, regulasi, dan tantangan di beberapa negara, termasuk Inggris, Jerman, Kenya, Amerika Serikat, Argentina, India, Jepang, Malaysia, Singapura dan Australia. Berdasarkan tinjauan literatur perbandingan asuransi wajib kendaraan bermotor di beberapa negara tersebut, terdapat pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menerapkan asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL) sebagai berikut:

## **Penguatan Regulasi Terpusat**

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan regulasi terpusat yang serupa dengan Jerman dan Inggris. Ini akan memastikan konsistensi dan efektivitas dalam penegakan undang-undang asuransi wajib, sehingga memudahkan semua pemangku kepentingan untuk memahami dan mematuhi peraturan.

### **a. Peningkatan Cakupan Minimum**

Mengintegrasikan perlindungan tambahan, seperti cedera fisik pada pengemudi sendiri atau perlindungan properti pihak ketiga, sesuai dengan kebutuhan lokal. Sangat penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi dan berpotensi meningkatkan persyaratan cakupan minimum untuk asuransi TPL yang mencakup perlindungan tambahan untuk pengemudi dan kerusakan properti, selaras dengan kebutuhan lokal dan memastikan perlindungan keuangan yang komprehensif untuk semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan

### **b. Sistem Penegakan yang Kuat**

Mengadopsi sistem sanksi yang tegas, seperti denda tinggi dan penyitaan kendaraan bagi pelanggar, untuk meningkatkan kepatuhan. Menerapkan sistem penegakan yang kuat sangat penting dan dapat belajar dari negara-negara seperti Jerman, di mana hukuman ketat, seperti denda tinggi dan penyitaan kendaraan karena ketidakpatuhan, efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan asuransi.

### **c. Pendidikan dan Kesadaran Publik**

Mengikuti model Jepang dan Singapura yang memprioritaskan edukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Edukasi dan kampanye kesadaran dapat belajar dari Jepang dan Australia dalam menjalankan kampanye edukasi publik secara masif untuk meningkatkan kesadaran pentingnya asuransi kendaraan bermotor.

### **d. Penyelarasan dengan Teknologi Modern**

Mengadopsi inovasi teknologi seperti integrasi digital dalam pendaftaran dan validasi asuransi, sebagaimana dilakukan di beberapa negara maju. Digitalisasi system dimana asuransi negara-negara seperti Inggris dan Australia telah berhasil mengintegrasikan sistem asuransi dengan basis data nasional, memungkinkan pelacakan yang mudah terhadap pengemudi yang tidak mematuhi kewajiban asuransi.

### **e. Pendirian Dana Kompensasi**

Pembentukan lembaga seperti Motor Insurers' Bureau di Inggris dapat menjadi model untuk Indonesia dalam menangani klaim dari korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi

tanpa asuransi. Ini akan memastikan bahwa korban menerima kompensasi bahkan ketika pihak yang bersalah tidak memiliki asuransi

#### f. Penerapan Sistem No-Fault Insurance

Sistem no-fault insurance seperti di Amerika Serikat dapat dipertimbangkan untuk mempercepat proses klaim dan mengurangi beban litigasi di pengadilan. Ini dapat menyederhanakan proses klaim dan mengurangi beban pada sistem peradilan dengan meminimalkan litigasi terkait klaim kecelakaan

Dengan mengadaptasi pelajaran ini, diharapkan Indonesia dapat menerapkan dan meningkatkan sistem asuransi wajib kendaraan bermotor untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendukung keselamatan di jalan raya serta perlindungan keuangan bagi warganya.

## 4. KESIMPULAN

Hasil tinjauan literatur ini menyoroti pentingnya asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga untuk kendaraan bermotor sebagai instrumen perlindungan finansial yang diatur oleh undang-undang di berbagai negara. Meskipun kebijakan ini telah berhasil mengurangi beban finansial bagi korban kecelakaan dan mendorong kepatuhan hukum di kalangan pemilik kendaraan, tantangan seperti premi yang tinggi, proses klaim yang kompleks, dan tingkat kepatuhan yang rendah masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Penerapan teknologi digital, termasuk blockchain, menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses klaim, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem asuransi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem asuransi wajib, memastikan aksesibilitas yang lebih baik, keadilan dalam penetapan premi, dan penyederhanaan proses klaim. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan asuransi wajib dapat lebih efektif dalam melindungi semua pengguna jalan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Tinjauan literatur ini memiliki keterbatasan, dimana literature yang ditinjau tidak mencakup semua negara yang telah menerapkan asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga, sehingga analisisnya terbatas pada beberapa negara yang dipilih. Hal ini dapat mengurangi generalisasi temuan untuk konteks yang lebih luas. Keterbatasan lainnya Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur tradisional, yang mungkin tidak mencakup data empiris terbaru atau analisis kuantitatif yang lebih mendalam. Ini dapat membatasi pemahaman tentang dampak nyata dari kebijakan asuransi wajib. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi asuransi wajib di lebih banyak

negara, termasuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan efektivitas kebijakan. Dan penelitian empiris yang menggunakan data kuantitatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan asuransi wajib terhadap kecelakaan lalu lintas dan beban finansial korban dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Act on Securing Compensation for Automobile Accidents (ASCAA), 1955.
- Adams, J. (2018). The impact of local economic conditions on motor insurance premiums. *Journal of Regional Economics*, 12(4), 56-70.
- Ahmad, A., Hassan, M., & Karim, N. (2020). The impact of Road Transport Act on vehicle insurance compliance in Malaysia. *Journal of Transport Policy*, 18(4), 123-135.
- Ali, S., & Ismail, F. (2022). The role of blockchain in transforming motor insurance in Malaysia. *Journal of Digital Innovation in Finance*, 5(4), 67-82.
- Alvarez, R., & Perez, J. (2022). Blockchain applications in motor insurance: Case studies from Argentina. *Latin American Journal of Digital Innovation*, 8(2), 34-47.
- American Insurance Institute. (2021). Public education campaigns and their effects on insurance compliance. *Insurance Policy Review*, 18(3), 45-60.
- Australian Automobile Association. (2022). Annual report on CTP insurance in Australia. Retrieved from <https://www.aaa.asn.au>
- Black, J., & Green, P. (2021). Insurance premium inequalities in the UK motor insurance market. *Journal of Risk and Insurance Studies*, 15(3), 112-129.
- Braun, F. (2022). Risk-based pricing in German motor insurance: Equity and challenges. *Journal of European Insurance Studies*, 18(3), 56-70.
- Brown, A., Williams, R., & Carter, T. (2022). The role of blockchain in streamlining motor insurance claims in the UK. *European Journal of Digital Innovation*, 7(2), 45-60.
- Brown, P., Taylor, L., & Green, J. (2020). Socio-economic impacts of compulsory motor insurance in Australia. *Journal of Public Policy*, 14(2), 56-70.
- Chopra, R. (2022). Challenges in motor insurance compliance in India. *Journal of Risk and Insurance Studies*, 16(2), 85-99.
- Chua, K. (2021). Non-compliance issues in Singapore's motor insurance system. *Journal of Transport Law*, 15(2), 145-160.
- Clarke, M. A. (2020). *Principles of Insurance Law*. Oxford University Press.
- Dr., Deshmukh, Kanchan, Samish.. (2023). Literature Review. 65-84. doi: 10.1017/9781009010054.005

- Fernandez, C. (2022). Economic challenges in the Argentine motor insurance industry. *Journal of Insurance and Risk Management*, 15(3), 56-72.
- Fujimoto, A. (2022). "The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Insurance Claims Processes." *Journal of Insurance Innovation*, 9(3), 78-90.
- Fundación Seguridad Vial. (2022). Informe anual sobre seguridad vial y seguros obligatorios. Retrieved from <https://www.seguridadvial.org>
- Goh, S., & Tan, L. (2022). Blockchain applications in Singapore's motor insurance industry. *Asian Insurance Technology Journal*, 8(1), 35-50.
- Gonzalez, A., Martinez, L., & Lopez, F. (2020). Socio-economic impacts of compulsory motor insurance in Argentina. *Argentine Public Policy Review*, 10(4), 45-63.
- Gupta, R., & Patel, S. (2020). Role of digital innovation in the motor insurance sector. *Journal of Technology and Insurance*, 14(2), 34-50.
- Harris, M. (2020). Addressing uninsured vehicles in rural Australia: Policy recommendations. *Journal of Transport Policy*, 18(3), 45-60.
- Harrison, D. (2020). Challenges in motor insurance claims: Lessons from the UK. *Journal of Insurance Practice*, 18(4), 89-105.
- Hoffmann, L. (2021). The issue of uninsured vehicles in Germany: Trends and solutions. *German Transport Law Review*, 12(4), 89-102.
- Insurance Information Bureau of India (IIB). (2022). Annual report on motor insurance in India. Retrieved from <https://www.iib.gov.in>
- Johnson, M., Taylor, S., & Lee, H. (2021). Socio-economic impacts of compulsory motor insurance in the United Kingdom. *British Journal of Public Policy*, 14(2), 56-72.
- Johnson, R. (2021). Variability in CTP premiums across Australian states: An analysis. *Australian Journal of Insurance Studies*, 15(4), 78-92.
- Johnson, T. (2019). Comparative analysis of no-fault and tort systems in the United States. *Journal of Insurance Policy Studies*, 16(1), 78-92.
- Keller, M. (2022). Premium disparities in German motor insurance: An analysis. *Journal of Risk and Insurance*, 20(2), 33-45.
- Kenya Law Reports. (1945). Insurance (Motor Vehicle Third Party Risks) Act. Nairobi: Kenya Law.
- Kobayashi, T., & Sato, M. (2019). "The Role of Jibaiseki Hoken in Traffic Accident Compensation." *Japanese Journal of Insurance Studies*, 45(2), 123-135.
- Kumar, S. (2020). Streamlining motor insurance claims in India: A critical analysis. *Indian Insurance Review*, 14(3), 45-58.

- Lange, S., & Becker, R. (2022). Blockchain applications in motor insurance: A German perspective. *European Journal of Digital Innovation*, 7(1), 44-58.
- Lee, C., & Wong, T. (2019). Effectiveness of compulsory motor insurance in Malaysia: A socio-economic perspective. *Asian Insurance Review*, 25(2), 45-58.
- Lee, C., Tan, J., & Lim, P. (2020). Socio-economic impacts of compulsory motor insurance in Singapore. *Singapore Journal of Public Policy*, 12(4), 78-92.
- Mahmood, R., Latif, A., & Harun, N. (2021). Pricing inequalities in Malaysian motor insurance: A critical review. *Journal of Insurance Economics*, 8(2), 134-150.
- Martinez, L., & Lopez, F. (2021). Enforcement of motor insurance laws in Argentina: Challenges and successes. *Journal of Latin American Policy Studies*, 13(2), 78-91.
- Matsui, H. (2020). "Evaluating the Coverage of Third-Party Liability Insurance in Japan." *Asian Journal of Risk Management*, 8(1), 67-80.
- Mehta, P., Sharma, A., & Singh, R. (2022). Blockchain technology in Indian motor insurance: Opportunities and challenges. *Asian Journal of Digital Innovation*, 9(1), 30-44.
- Motor Insurers' Bureau (MIB). (2022). Tackling uninsured driving in the UK: Annual report. Retrieved from <https://www.mib.org.uk>
- Müller, T., & Schmidt, H. (2021). Enforcement of compulsory motor insurance laws in Germany: Effectiveness and challenges. *German Journal of Public Policy*, 15(2), 12-28.
- Ng, H. (2020). Challenges in motor insurance claims: A Singapore perspective. *Insurance Studies in Asia*, 9(3), 101-115.
- Ogutu, M. (2021). Analysis of Third Party Liability Insurance for Motor Vehicles in Kenya. *African Journal of Insurance and Risk Management*, 8(1), 101-117.
- Okuda, Y., & Yamamoto, K. (2022). "Challenges in Mandatory Motor Insurance Policies in Japan." *Journal of Japanese Law and Policy*, 12(3), 45-60.
- Patel, K. (2022). Economic disparities in motor insurance adoption in India. *Journal of Financial Inclusion*, 11(4), 123-138.
- Rahim, Z., Noor, M., & Syed, F. (2020). Challenges in enforcing motor insurance compliance: Insights from Malaysia. *International Journal of Law and Policy*, 12(1), 78-95.
- Rahman, F. (2021). Risk-based premium calculation in motor insurance: Equity and challenges in Singapore. *Journal of Risk Management*, 10(2), 65-80.
- Rao, V. (2021). Awareness and adoption of motor insurance in rural India. *Indian Journal of Rural Studies*, 8(2), 66-80.
- Rodriguez, P. (2021). Addressing uninsured vehicles in Argentina: A policy perspective. *Journal of Transport and Law*, 14(3), 99-110.

- Schneider, K. (2021). Complexity in motor insurance claims processes: Insights from Germany. *Journal of Insurance Practice*, 19(4), 76-88.
- Sharma, N., & Gupta, R. (2020). Enforcement of motor insurance laws in India: An overview. *Journal of Transport Policy and Law*, 22(1), 12-28.
- Singh, A., Verma, H., & Das, P. (2021). Socio-economic impacts of compulsory motor insurance in India. *Indian Journal of Public Policy*, 10(3), 55-72.
- Smith, J., & Jones, R. (2019). *Mandatory Insurance Policies: Global Practices and Challenges*. Springer.
- Smith, L., & Brown, M. (2020). Decentralized management of motor insurance regulations in the US. *American Legal Studies Review*, 22(2), 12-28.
- Smith, L., & Jones, H. (2021). Enforcement and effectiveness of CTP insurance in Australia. *Journal of Legal Studies*, 19(1), 34-50.
- Smith, L., & Taylor, J. (2020). Enforcement of compulsory motor insurance in the UK: An overview. *Journal of Transport Policy and Law*, 19(1), 34-50.
- Stephanie, N., Welch., Emily, Lahr., Jessica, M., Webb. (2022). Researching and Conceptualizing an Effective Literature Review. 222-239. doi: 10.4018/978-1-7998-8283-1.ch012
- Sulaiman, S., Abdullah, R., & Iskandar, A. (2021). Addressing disparities in motor insurance accessibility in rural Malaysia. *Journal of Financial Inclusion*, 10(3), 200-215.
- Tan, W., & Lim, H. (2021). Enforcement of motor insurance laws in Singapore: An evaluation. *Journal of Legal Studies in Asia*, 14(3), 200-220.
- Tanaka, R. (2021). "Compliance and Awareness of Jibaiseki Hoken among Japanese Drivers." *Journal of Social Insurance and Policy*, 10(4), 89-102.
- Taylor, D., & Evans, S. (2022). Blockchain applications in Australian motor insurance. *Journal of Digital Innovation*, 8(3), 55-68.
- Thompson, K. (2021). Challenges in motor insurance claims: Insights from Australia. *Journal of Insurance Practice*, 17(4), 67-80.
- Torres, D. (2020). Challenges in motor insurance claims processes: Insights from Argentina. *Journal of Insurance Practice*, 12(1), 67-79.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)
- Wachira, F. N. (2018). Impact of Third Party Motor Insurance on Road Safety in Kenya. *Journal of Transport and Logistics*, 6(3), 75-89.
- Walker, E. (2022). Barriers to fair compensation in UK motor insurance claims. *Insurance Law Review*, 10(3), 72-88.

- Weber, J., Kraus, P., & Fischer, L. (2020). Socio-economic impacts of compulsory motor insurance in Germany. *German Public Policy Review*, 14(3), 45-62.
- Wilson, K. (2021). Compliance trends in mandatory motor insurance: Insights from the US. *Journal of Risk and Compliance*, 19(4), 67-80.
- Wong, T. (2022). The rising cost of motor insurance in Singapore: Causes and solutions. *Singapore Financial Review*, 18(1), 50-63.
- Zainuddin, H. (2022). Complexities in motor insurance claims: A Malaysian context. *Malaysian Insurance Studies*, 15(1), 99-110.